

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan diikuti oleh kebijakan pendukungnya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi, serta dikeluarkannya Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dari BSNP Tahun 2006, telah melahirkan inovasi tentang otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Dikdasmen Depdiknas (Hernawan, 2006:4), diketahui ada kecenderungan bahwa mutu pendidikan lebih banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik (aspek kognitif), dan mengabaikan aspek akhlak, budi pekerti, seni, dan kecakapan lainnya. Hernawan (2006:4) memaparkan secara lebih rinci hasil evaluasi itu sebagai berikut:

1. Beban belajar siswa terlalu berat yang disebabkan oleh banyaknya mata pelajaran dan materi/substansi setiap mata pelajaran.
2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

3. Terjadinya deviasi misi mata pelajaran tertentu dengan kegiatan belajar mengajar, seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Kerajinan Tangan dan Kesenian yang lebih menekankan proses pembelajaran teoretis.
4. Bersifat sangat populis yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh tanah air yang sebenarnya memiliki potensi, aspirasi, dan kondisi lingkungan yang berbeda.
5. Kurang memberikan kemerdekaan pada guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan improvisasi dan justifikasi sesuai kondisi lapangan.

Penjaminan terhadap mutu pendidikan itu sendiri sudah dituangkan dalam sistem regulasi. Pada pasal 38 ayat pertama UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa "Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah". Kemudian ayat kedua dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah". Selain itu telah ditetapkan pula standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas delapan standar, yakni: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan serta Standar Penilaian Pendidikan. Kehadiran standar-standar ini penting karena diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Terkait adanya standar nasional pendidikan, menurut Budiono dalam Kardiawarman (2002: 16-17) dijelaskan bahwa:

...adanya standar, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat daerah merupakan kebutuhan pendidikan dan kurikulum di Indonesia pada masa kini. Standar tersebut akan memberikan dasar bagi para pengembang kurikulum untuk mencapai kualitas yang diinginkan bangsa dan masyarakat, tetapi pada waktu bersamaan kreativitas dalam mengembangkan kurikulum dapat dilakukan. Kreativitas kurikulum dapat ditingkatkan dan pengalaman belajar peserta didik dapat disesuaikan dengan *entry behaviour* dan teori belajar yang sesuai dengan lingkungan sosial-budaya peserta didik dan sekolah. Kreativitas kurikulum akan menghasilkan differensiasi kurikulum yang sesuai dengan karakteristik wilayah tanpa khawatir akan terjadi perbedaan kualitas. Oleh karena itu pengembangan standar tingkat nasional dan daerah merupakan sesuatu yang tak dapat dihindarkan dalam era dimana pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan dirinya dalam menghadapi persaingan dunia global tetapi tetap memperhatikan dan berakar pada budaya dan kondisi sosial di wilayah tertentu.

Pada sisi yang lain, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menjadi momentum perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yakni dari paradigma sentralisasi ke arah paradigma desentralisasi. Kondisi tersebut menimbulkan perubahan pada sistem pengembangan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan. Dengan kata lain, sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik dengan sendirinya berubah menjadi sistem yang lebih bersifat desentralistik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kepada setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah) untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan. Sekolah atau madrasah, selain bisa melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan minimal yang bersifat nasional, juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan siswa, masyarakat sekitar, dan kekhasan daerah. Pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan berpotensi untuk meningkatkan kinerja pihak sekolah, memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang ada, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah dan guru adalah pelaku utama perancang kurikulum. Mereka diharapkan dapat memahami standar isi yang telah ditetapkan, mencurahkan ide-ide pembaharuan kurikulum, dan menuangkan berbagai potensi yang dimiliki sekolah serta dapat mentransformasikannya ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah dan guru juga berkesempatan untuk melakukan penilaian keberhasilan kurikulum yang telah dikembangkannya, sehingga mengetahui ketercapaian implementasi kurikulum di sekolahnya. Adanya kewajiban sekolah untuk mengembangkan kurikulum memberikan konsekuensi terhadap perubahan paradigma kurikulum sekolah, yaitu dengan dibutuhkan kurikulum yang dapat mengakomodasi keragaman potensi dan karakteristik yang ada di sekolah dan lingkungannya. Kurikulum yang dikembangkan dengan mengakomodasi berbagai

potensi dan karakteristik yang beragam tersebut dikenal dengan istilah kurikulum yang berdiversifikasi.

Kurikulum berdiversifikasi ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dimunculkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di Indonesia dan didasarkan pada adanya kebijakan-kebijakan otonomi pendidikan sebagai tindak lanjut diterapkannya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa "kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik". Sementara dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dengan tegas perlunya dilakukan pembaharuan berupa diversifikasi kurikulum yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkannya dalam rangka melayani keberagaman siswa, diversifikasi jenis pendidikan secara profesional, dan sesuai dengan kepentingan daerah.

Mengingat bahwa Indonesia memiliki keragaman kultur, etnis, bahasa, dan geografis serta potensi dan karakteristik lainnya, maka implementasi kurikulum berdiversifikasi semestinya tumbuh subur dan menjadi keniscayaan untuk dikembangkan di Indonesia yang bersemboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Zais (1976:101) mengemukakan bahwa *society and culture* adalah salah satu faktor yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum, begitu pula Tyler (1988:25-43) yang menjelaskan bahwa *studies of contemporary life, uses philosophy*, dan *studies of learners* sebagai faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan

kurikulum. Selain kedua pakar di atas, terkait landasan filosofis dan teoritis bagi pengembangan kurikulum, Hasan (2007:483) menyatakan sebagai berikut.

...Kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat. Sebuah kurikulum tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, fisik, ekonomi, agama masyarakat yang dilayani kurikulum. Kurikulum sebuah satuan pendidikan di suatu lingkungan pertanian berbeda dengan kurikulum untuk masyarakat nelayan, kota, atau industri pada tiga tahun pertama. Peserta didik harus mengenal lingkungan dengan baik dan belajar dari lingkungan tersebut kepada lingkungan yang lebih luas.

Paparan di atas menegaskan bahwa keragaman budaya dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat dan keragaman siswa yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut harus menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum.

Kajian tentang kurikulum berdiversifikasi di Indonesia agak terbatas, baik dari sisi keluasan maupun kedalamannya. Keterbatasan kajian yang ada ini tentunya kurang mendukung pengembangan dan implementasi dari kebijakan perundang-undangan dan kondisi nyata tentang potensi dan karakteristik yang dimiliki Indonesia. Visi tentang “Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan” masih belum berjalan dengan baik untuk mereliasasikan kurikulum yang memiliki diversifikasi sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di setiap daerah dan sekolah.

Berdasarkan penelusuran penulis, baik yang berkenaan dengan sumber rujukan tercetak maupun penelaahan pada repository web UPI sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi pengembangan kurikulum jenjang sarjana sampai program doktoral, penulis hanya menemukan sejumlah kecil kajian kurikulum berdiversifikasi, yaitu mengenai:

“pengembangan kurikulum berdiferensiasi (PKD) yang diperuntukkan bagi anak berbakat” (Semiawan, 1992), “panduan kurikulum berdiversifikasi untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2004” (Sri Hayati, dkk, 2004), “pengembangan model kurikulum berdiversifikasi yang menekankan pada keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa dan lingkungan setempat (daerah dan sekolah)” (Hernawan dkk, 2004), "*Challenge and Chance for the Implementation of Diversified Curriculum in Primary Schools in Indonesia*" (Wahyudin et al, 2010), dan beberapa hasil penelitian mahasiswa Pascasarjana pada Program Studi Pengembangan Kurikulum mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 (Khairulnas, Nurjaya, Sabriadi, Abas, Ludi, Qurniadi, Waluyo) yang pada umumnya meneliti tentang muatan lokal di berbagai jenjang dan daerah sebagai salah satu bentuk kurikulum berdiversifikasi.

Salah satu hasil penting dari penelitian yang dilakukan Hernawan dkk (2004: 39) adalah bahwa:

... (1) Kurikulum berdiversifikasi pada dasarnya merupakan penunjang pelaksanaan Kurikulum 2004 (KBK) yang di dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan, diperluas, dan diperdalam sesuai dengan keberagaman potensi dan kemampuan peserta didik. ...(2) Pihak sekolah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengembangkan kurikulum berdiversifikasi, ...terutama guru, harus memiliki kesiapan dalam mengembangkan kurikulum berdiversifikasi di sekolahnya masing-masing."

Sedangkan hasil kajian Wahyudin et.al (2010:8) juga menyimpulkan hal yang hampir serupa sebagai berikut.

*...(1) a DC is used as guideline and reference by teachers to implement the curriculum in line with the spirit of potensial local issues. (2) the diversity of local potential aspects can be adopted and developed by local schools as well as teachers as specific characteristics that should be deliberated in the DC. (3) the socialization of DC is a compulsory*

*addressed and given to any related institution in district level as well as school level, included to students as the subject and object of the program, and (4) as a new concept of innovation in curriculum, the DC requires a full strong commitment and collaboration among the principal and teachers, during planning, implementing, and evaluation stages.*

Dari berbagai hasil kajian dan penelitian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam implementasi kurikulum berdiversifikasi, khususnya guru dituntut untuk memiliki kesiapan. Kesiapan yang harus dimiliki guru menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum berdiversifikasi yang tidak hanya terkait dengan pelaksanaannya, tetapi juga terkait dengan bagaimana merencanakan dan melakukan evaluasinya.

Beberapa penelitian dan kajian lain, yang menunjukkan pentingnya kurikulum berdiversifikasi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Boyer & Hill (1973:2). Mereka menegaskan bahwa: *"...Children must be taught, through a desegregated, diversified curriculum, that differences are to be appreciated rather than challenged. Inclusion of minorities (of all descriptions) into the curricular program helps to bring about that appreciation"*. Selanjutnya Kridel (2010:20) juga melakukan kajian dan menegaskan bahwa kurikulum berdiversifikasi yang terjadi di sebagian besar negara Afrika, dan sebagaimana kasus di negara yang telah maju, seringkali merupakan hasil dari suatu periode krisis. Studi tersebut menunjukkan bahwa kurikulum berdiversifikasi dimulai (diinisiasi) oleh negara, namun dalam beberapa kasus, misalnya di Sierra Leone, merupakan desakan Bank Dunia terhadap negara tersebut. Kurikulum berdiversifikasi merupakan fokus dari studi di Afrika karena menawarkan solusi bagi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi negara-negara Afrika, terutama

tingginya angka pengangguran pemuda maupun meningkatnya biaya pendidikan formal.

Dalam *A Curriculum for the 21st Century* (QEP, t.t.) dijelaskan bahwa *differentiated instruction* menunjuk pada praktik pedagogik yang memperhatikan heterogenitas siswa dalam perolehan belajar sebelumnya, minat dan gaya belajar; sedangkan diversifikasi menunjuk pada rancangan organisasional yang dibuat untuk merespon karakteristik individual, rancangan yang mencakup mata pelajaran pilihan dan jalur (jurusan) yang berbeda. Rancangan organisasional ini mencakup lebih dari sekedar pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan (*abilities*) atau minat mereka. Kemudian Boyer & Hill (1973:3) menegaskan bahwa beberapa ahli kurikulum menolak perlunya melakukan desegregasi kurikulum dengan berdasarkan alasan bahwa hal tersebut akan menciptakan konflik antar pembelajar. Menurut Boyer & Hill (1973:3), pandangan tersebut tidaklah tepat karena konflik merupakan karakteristik alamiah dari masyarakat, juga dari hubungan diantara sekolah-sekolah multirasial dan kesempatan yang berbeda untuk memuaskan harapan berbagai individu dan kelompok. Untuk bisa tetap eksis, sekolah harus dapat menjawab permasalahan ini. Dengan demikian, adanya kurikulum berdiversifikasi diharapkan dapat mewartakan keberagaman potensi dan kemampuan siswa yang dalam pengembangannya harus bersifat demokratis serta berorientasi pada penguasaan kompetensi dasar yang direfleksikan melalui cara berfikir, bersikap, dan bertindak.

Berdasarkan paparan hasil kajian, teori-teori kurikulum, dan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

implementasi kurikulum berdiversifikasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mendukung implementasi kurikulum yang dikembangkan di setiap sekolah, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP sudah semestinya dikembangkan dan diimplementasikan dengan memperhatikan azas dan prinsip pengembangan kurikulum, baik diversifikasi berdasarkan potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, maupun daerah. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam, baik dari sisi geografis, demografis, sosial, maupun budaya.

Sebagai amanat dari perundangan-undangan dan beberapa kebijakan yang mengikutinya, kurikulum berdiversifikasi seharusnya menjadi kewajiban sekolah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya melalui pengembangan kurikulum yang berdiversifikasi. Namun kenyataan di berbagai satuan pendidikan tidaklah demikian. KTSP yang seharusnya disusun dan dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian Nuryanti (2009:33) menunjukkan bahwa:

"...pada umumnya di setiap sekolah sudah memiliki tim pengembang KTSP, namun dalam merumuskan bagian-bagian KTSP, tim pengembang kurikulum di sekolah masih banyak yang tidak mengikuti rambu-rambu atau pedoman. ...Bagian yang masih dianggap sering keliru antara lain, dalam merumuskan visi, misi, mengembangkan keunggulan lokal dan global, dan pendidikan kecakapan hidup. Khususnya point kedua terakhir, yaitu keunggulan lokal dan global dirumuskan dengan tidak jelas."

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Masih ada sekolah yang tidak memiliki tim pengembang kurikulum dan belum memiliki KTSP. Tidak sedikit sekolah yang

menyatakan telah memiliki KTSP hanya dengan cara mengadopsi KTSP yang telah disusun oleh sekolah dan pihak lain. KTSP yang seharusnya melahirkan keberagaman, tetapi berujung pada keseragaman. Adanya realitas seperti ini, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain oleh ketidaksiapan tim pengembang kurikulum di sekolah, khususnya diduga karena belum memadainya kompetensi yang dimiliki tim pengembang kurikulum sekolah untuk mengembangkan KTSP dan perangkat pendukung lainnya.

Keberhasilan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ornstein & Hunkins (2009: 250) menyatakan bahwa "*successful curriculum implementation results from careful planning, which focuses on three factors: people, programs, and process*". Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa beberapa sekolah telah gagal mengimplementasikan kurikulum karena mengabaikan faktor orang dan mencurahkan banyak waktu dan dana hanya untuk memodifikasi program atau prosesnya saja. Di sisi lain memfokuskan pada program baru memberikan cara baru kepada orang untuk mencapai program baru pada sekolah. Proses pengorganisasian juga penting, karena dapat menggerakkan orang untuk memandu kepada hal yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab sukses tidaknya implementasi kurikulum. Dilihat dari dimensi kurikulum, Hasan (2007:479) menjelaskan bahwa implementasi kurikulum adalah dimensi proses. Hasan memaparkan bahwa "...Dimensi proses adalah implementasi dari apa yang direncanakan dalam dimensi dokumen. Pelaksanaan atau implementasi itu

mungkin sama tapi mungkin juga berbeda dari apa yang direncanakan dalam dokumen". Dari paparan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa implementasi kurikulum (dimensi proses, disebut dengan istilah *implemented, observed*, atau *reality*) terkait erat dengan dokumen kurikulum tertulis atau *written document* (dimensi dokumen). Oleh karena dalam dokumen kurikulum berisikan komponen, seperti tujuan, konten, proses, dan asesmen yang akan menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (implementasi kurikulum).

Selanjutnya Hasan (2007:481) menjelaskan sebagai berikut.

...Dalam implementasi berbagai faktor bekerja berpengaruh terhadap implementasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung untuk keberhasilan, seperti manajemen sekolah yang baik, kontribusi komite sekolah, sikap masyarakat, semangat dan dedikasi guru serta fasilitas belajar yang memenuhi syarat serta ketersediaan dana yang diperlukan. Faktor-faktor tersebut bekerja seperti pisau bermata dua, selain menjadi faktor pendukung tetapi dapat juga menjadi faktor penghambat.

Berdasarkan paparan dari Hasan (2007) di atas, dapat dikatakan bahwa dokumen dan guru termasuk kedalam faktor penting yang berperan dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Terkait dengan faktor guru, terdapat beberapa hal yang turut berperan dalam kinerja seorang guru, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa penelitian, diantaranya adalah efikasi diri (Goddard, K.H. & Woolfolk H., 2000; Tschannen-M. & Woolfolk H., 2000) dan pelatihan (Ting dkk, 2012:173-177; Rahman dkk, 2011).

Oleh karena itu, berbeda dengan berbagai kajian yang telah dilakukan dalam implementasi kurikulum berdiversifikasi, penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimanakah keterkaitan antara faktor-faktor yang berpengaruh tersebut

terhadap implementasi kurikulum berdiversifikasi di sekolah, khususnya di sekolah dasar.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi kurikulum berdiversifikasi di sekolah dasar dengan dilandasi oleh dua pemikiran. Dasar pemikiran pertama berkaitan dengan kebermanfaatannya, yaitu bahwa implementasi kurikulum berdiversifikasi di sekolah dasar bermanfaat dalam membantu mengembangkan potensi siswa sedini mungkin, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No.20 Th.2003 tentang Sisdiknas, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sejalan pula dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu bahwa kurikulum dikatakan bermanfaat apabila kurikulum tersebut memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Tingkat relevansi ini dapat digambarkan berdasarkan sumbangsiah kurikulum dalam menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan siswa menjalani kehidupan di masa kini dan masa mendatang, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai anggota bangsa dan sebagai warga dunia (Kardiawarman, 2002). Dasar pemikiran kedua berkaitan dengan kesesuaian antara karakteristik kurikulum berdiversifikasi dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Kurikulum berdiversifikasi memiliki ciri memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia, seperti sumberdaya manusia, karakteristik fisik dan lingkungan, budaya, etnik, dan sebagainya (Wahyudin & Hernawan, 2010). Blank, Coombs Owen, and

Cohen (1989, 1997, and 2002, dalam Wahyudin & Hernawan, 2010) menyatakan bahwa implementasi kurikulum berdiversifikasi seharusnya sesuai dengan orientasi lingkungan kehidupan, minat siswa, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karakteristik lokal, dan standar kompetensi minimum yang seharusnya dicapai siswa. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget (Hurlock, 1990), siswa sekolah dasar berada pada perkembangan kognitif tahap operasi konkret, artinya, ia akan belajar dengan mudah terhadap materi-materi yang bersifat konkret. Melalui implementasi kurikulum berdiversifikasi yang menawarkan materi yang ada di sekitar siswa, maka siswa akan dapat dengan mudah memperoleh standar kompetensi minimum yang diharapkan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Keberhasilan implementasi kurikulum menurut Ornstein & Hunkins (2009: 250) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: orang, program, dan proses. Terkait dengan faktor orang, di Indonesia, guru menjadi faktor yang sangat strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Tercapai tidaknya tujuan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru. Oleh karena itu pelaksanaan kurikulum berdiversifikasi ini juga diduga banyak dipengaruhi oleh faktor guru, misalnya terkait dengan kompetensi profesional yang dimiliki, motivasi kerja, kinerja yang ditampilkan, dedikasi, keyakinan akan kemampuan diri, dan pengalaman guru, baik latar belakang kualifikasi akademik, keikutsertaan dalam diklat profesional, maupun lama mengajar. Dalam penelitian ini, keyakinan diri atau efikasi diri akan menjadi fokus penelitian dengan

anggapan bahwa efikasi diri diharapkan dapat mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Penilaian kemampuan guru secara langsung pada saat ini kiranya kurang bijaksana karena saat ini guru masih "trauma" dengan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG).

Selain oleh faktor guru, implementasi kurikulum juga diduga berkaitan dengan faktor program, dalam penelitian ini program diasumsikan sebagai dokumen kurikulum yang disusun tim pengembang kurikulum. Kualitas dokumen kurikulum yang baik semestinya dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kurikulum (guru) untuk dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik pula.

Merujuk pada latar belakang dan identifikasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Rumusan Masalah Umum

Bagaimanakah kontribusi efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum dan kualitas dokumen kurikulum terhadap implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD?

2. Rumusan Masalah Khusus

- a. Bagaimanakah kontribusi efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum terhadap implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD?

- b. Bagaimanakah kontribusi kualitas dokumen kurikulum terhadap kualitas implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD?

- c. Apakah efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum berhubungan dengan kualitas dokumen kurikulum

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memverifikasi kontribusi efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum dan kualitas dokumen kurikulum terhadap kualitas implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD.

#### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Memverifikasi kontribusi efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum terhadap implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD.
- b. Memverifikasi kontribusi kualitas dokumen kurikulum terhadap kualitas implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD.
- c. Memverifikasi hubungan antara efikasi diri tim pengembang kurikulum tentang pengembangan kurikulum dan kualitas dokumen kurikulum berdiversifikasi di SD.

#### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Penelitian tentang implementasi kurikulum berdiversifikasi di SD diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konstibusi terhadap pengembangan disiplin ilmu kurikulum, khususnya terkait pengembangan kurikulum yang berdiversifikasi di Indonesia. Dengan keragaman potensi dan karakteristik yang dimiliki Indonesiaa, pengembangan kurikulum yang berdiversifikasi merupakan suatu yang semestinya dikembangkan, diimplementasikan, dan tentunya dioptimalkan. Adanya kurikulum berdiversifikasi diharapkan dapat membuka akses dan memfasilitasi berbagai perbedaan potensi dan karakteristik siswa, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan keragaman daerah. Pengembangan kurikulum berdiversifikasi, khususnya di SD, juga diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian program pendidikan untuk semua (*education for all*) yang telah menjadi konvensi seluruh negara di berbagai belahan dunia.

Melalui penelitian diharapkan dapat menggambarkan berbagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap kualitas implementasi kurikulum, khususnya terkait dengan faktor guru yang dilihat berdasarkan efikasi diri dalam pengembangan kurikulum dan faktor kualitas dokumen yang dilihat berdasarkan dokumen KTSP, silabus, dan RPP. Dengan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diharapkan dapat dicarikan suatu solusi bagi upaya

pengembangan kurikulum berdiversifikasi yang ada berbagai daerah dan wilayah di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para pengelola dan praktisi pendidikan (pengawas sekolah, tim pengembang kurikulum, kepala sekolah, dan guru) dan para *stakeholders* pendidikan yang ada di daerah dalam mengimplementasikan kurikulum berdiversifikasi. Dengan implementasi kurikulum seperti ini diharapkan akan membantu mengoptimalkan berbagai keragaman potensi yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan pendidikan, baik yang terkait dengan peningkatan akses, relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan daerah maupun peningkatan mutu pendidikan.

Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk ditindaklanjuti oleh berbagai unsur terkait, khususnya dalam upaya penyiapan tenaga atau tim pengembang kurikulum di sekolah, peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengembang dan pelaksana kurikulum di sekolah, dan peningkatan kualitas dokumen kurikulum berdiversifikasi.

## **3. Manfaat bagi Penelitian Lanjutan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penelitian lanjutan dan memberikan wacana tentang berbagai aspek implementasi kurikulum berdiversifikasi yang dapat dikaji lebih mendalam selain dari variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini.